WNI Tewas Dehidrasi di Gurun Saudi .....

Dari Halaman 1

Makkah. SM bersama dua orang lainnya yakni J dan S kembali mencoba peruntungan.

Kali ini, SM dan dua rekannya berusaha memasuki wilayah Makkah menggunakan taksi gelap melalui area gurun pasir. Namun, belum sampai Makkah, ketiganya justru diturunkan secara sepihak oleh sopir taksi tersebut di tengah gurun.

"Dalam upayanya mencoba masuk kota Makkah secara ilegal tersebut, ketiga WNI tiba-tiba dipaksa untuk turun di tengah gurun oleh sopir taksi karena takut tertangkap patroli aparat keamanan Arab Saudi," kata Yusron seperti dikutip dari Antara, Ahad (1/6).

Singkat cerita, ketiga WNI itu kemudian ditemukan oleh patroli pesawat Drone aparat keamanan Arab Saudi. Saat ditemukan, SM sudah dalam keadaan meninggal dunia, diduga mengalami dehidrasi.

"Satu WNI atas nama SM ditemukan telah meninggal dunia, sementara dua WNI lainnya atas nama J dan S, berhasil diselamatkan," ucap Yusron.

Disampaikan Yusron, J dan S selanjutnya dibawa aparat keamanan ke rumah sakit. Setelah mendapat perawatan, keduanya diminta kembali ke Kota Jeddah.

"J dan S dibawa aparat keamanan ke rumah sakit dan setelah menjalani perawatan kembali diusir ke Kota Jeddah," ujarnya.

Sementara itu, kata Yusron, untuk jenazah SM saat ini berada di rumah sakit di Makkah untuk divisum. Rencananya, pemakaman akan dilakukan setelah visum selesai.

Yusron menyebut KJRI Jeddah terus melakukan penanganan lebih lanjut terhadap jenazah SM dan telah berkoordinasi dengan keluarga almarhum SM yang berasal dari daerah Madura.

Lebih lanjut, KJRI Jeddah kembali mengimbau kepada seluruh WNI agar tidak terlibat dalam aktivitas haji nonprosedural, serta selalu mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi.

"Marilah kita bijak dalam menyikapi perintah Allah untuk berhaji, jangan sampai uang hilang haji melayang," kata dia**.(cnni/js)**

Dirut Bank Sumut Diperiksa Kejagung .....

Dari Halaman 1

rektur Komersial dan UMKM Bank BJB.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa sembilan orang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD Jateng) kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas anak usaha. Dari sembilan orang tersebut, Kejagung memanggil dua orang masing-masing dari jajaran direksi Bank BJB dan Bank DKI.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Dr. Harli Siregar, S.H, M.Hum menerangkan, sembilan orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit Bank BJB, PT Bank DKI dan BPD Jateng kepada PT Sritex dan entitas anak usaha atas nama Tersangka ISL dkk. kemarin sudah berangkat ke Jakarta," ujar narasumber. "iya panggilan oleh kejaksaan," ujar pejabat bank sumut.

Berdasarkan informasi dari website resmi kejagung, Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa sembilan orang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD Jateng) kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas anak usaha.

Dari sembilan orang tersebut, Kejagung memanggil dua orang masing-masing dari jajaran direksi Bank BJB dan Bank DKI.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Dr. Harli Siregar, S.H, M.Hum menerangkan, sembilan orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit Bank BJB, PT Bank DKI dan BPD Jateng kepada PT Sritex dan entitas anak usaha atas nama Tersangka ISL dkk.

Dua orang direksi yang dipanggil sebagai saksi itu adalah BFW selaku Direktur Kredit UMKM & Usaha Syariah PT Bank DKI tahun 2020. Satu direksi lainnya adalah NA selaku Direktur Komersial dan UMKM Bank BJB.

PT Sritex sempat viral di indonesia. Kasus Dirut PT Sritex telah ditetapkan sebagai tersangka, dia diduga menggunakan uang kredit tersebut tidak sesuai peruntukan, seperti untuk membayar utang dan membeli tanah. kasus itu diduga merugikan negara sebesar Rp692 miliar dengan outstanding kredit sebesar Rp3,5 triliun**. (de/js)**

Ratusan Buruh Gelar Aksi Tolak Impor .....

Dari Halaman 1

untuk memberantas praktik impor tekstil ilegal, memperketat aturan impor untuk melindungi keberlangsungan industri padat karya dalam negeri dan melakukan tindakan antisipatif untuk mencegah terjadinya PHK semakin meluas.

Bakal Serbu RI

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSYFI) menyoroti dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang belum lama diumumkan Presiden Donald Trump terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan, kebijakan ini akan mengubah peta perdagangan TPT dunia dan menekan seluruh negara produsen.

Indonesia diyakini bakal semakin diserbu produk tekstil impor.

"Negara-negara produsen seperti Cina, India, Vietnam, Bangladesh, Myanmar, dan Kamboja akan mencari alternatif pasar baru, dan Indonesia berisiko menjadi sasaran ekspor mereka," ujar Jemmy di Jakarta, Jumat (4/4/2025).

Jemmy menilai kebijakan ini akan mengganggu peta perdagangan global dan berpotensi membanjiri pasar domestik dengan produk impor dari negara produsen utama. API dan APSYFI, lanjut Jemmy, mendesak pemerintah mengambil langkah perlindungan, termasuk penguatan regulasi impor dan mempertahankan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

"Pemerintah juga harus mempertahankan kebijakan persetujuan teknis untuk pengaturan impor dan mempertahankan TKDN. Kami tekankan ekspor ke AS tidak ada kaitannya dengan aturan impor dan TKDN yang saat ini berlaku," ucap Jemmy.

Jemmy menyampaikan ekspor ke AS tidak ada kaitannya dengan aturan impor dan TKDN yang berlaku saat ini. Jemmy mendorong pemerintah merespons perang tarif dengan kebijakan tarif dan tidak melakukan pergeseran pada isu NTM (Non Tariff Measure) atau NTB (Non Tariff Barrier).

"API dan APSYFI juga mendorong pemerintah mempertahankan industri sektor padat karya yang sangat penting dalam hal penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat," lanjut Jemmy.

Meski AS memberlakukan tarif resiprokal, Jemmy menjelaskan ekspor TPT Indonesia masih bisa bersaing dengan memanfaatkan ketentuan 20 persen bahan baku dari AS. Jemmy menyampaikan AS tidak memproduksi benang dan kain, dan menjadi peluang Indonesia meningkatkan impor kapas dan mengombinasikannya dengan serat polyester atau rayon lokal.

"Ini akan memperbaiki kinerja TPT nasional secara keseluruhan dari hulu sampai hilir dan sekaligus menekan laju importasi barang jadi," sambung Jemmy.

Jemmy menyoroti ironi struktur impor TPT Indonesia yang dalam keadaan normal mengonsumsi sekitar 600 juta dolar AS kapas dari AS, namun

Indonesia justru mengimpor benang, kain dan garmen senilai 6,5 miliar dolar AS dari Cina. Hal ini justru mematikan industri TPT dalam negeri karena bersaing dengan tidak sehat.

"Hal ini juga mengakibatkan utilisasi mesin produksinya hanya sekitar 45 persen," ujar Jemmy.

Jemmy menyampaikan API dan APSYFI mendorong pemerintah melakukan negosiasi resiprokal dengan AS untuk meningkatkan impor kapas sebagai trade-off, sekaligus membuka akses bagi produk AS yang tidak diproduksi di Indonesia. Selain itu, kedua asosiasi meminta penertiban penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk mencegah praktik transhipment.

"Lonjakan ekspor ini dilakukan oleh trader bukan oleh produsen, namun imbasnya seluruh produsen Indonesia terkena BMAD oleh AS. Kita meminta pemerintah menertibkan penerbitan SKA yang hanya boleh diterbitkan bagi barang-barang yang diproduksi di Indonesia, bukan praktik transhipment," kata Jemmy. **(rep/js)**

Singapura Dilanda Suhu Ekstrem .....

Dari Halaman 1

"Sekolah mereka ada di gedung lama dan saya pernah ke sana untuk sesi pertemuan dengan orang tua. Kipas-kipas angin tidak memberikan ventilasi ke seluruh ruangan dan ini visa membuat ketidaknyamanan di beberapa sudut ruang kelas," kata Clement, dilansir Channel News Asia.

Keadaan diperparah dengan eksim yang dialami anak-anak Clement. Kulit mereka gatal, kering, dan bentol-bentol jika udara panas. Kondisi suhu panas ekstrem Singapura membuat eksim mereka kambuh.

Kegusaran Clement juga disampaikan sejumlah orang tua murid. Kemampuan belajar anak-anak mereka terganggu karena cuaca yang begitu panas.

Anak-anak susah fokus karena lebih sering mengipasi badan dengan kertas, bergerak-gerak di kursi mereka, hingga sibuk mengusap keringat.

Rynette Joyce Tan, ibu beranak empat yang juga pendiri platform edukasi kelahiran13Thirteen, menyebut bahwa suhu panas ekstrem membuat anak-anaknya lebih mudah marah

"Mereka komplain sering menjadi gatal-gatal dan cepat marah karena merasa kegerahan. Mereka mudah gelisah dan cenderung tidak bicara baik kepada orang lain," ujar Rynette.

Dia melihat anak-anaknya juga mudah lelah setelah pulang sekolah karena kepanasan. Mereka biasanya pulang-pergi menggunakan bus, tapi akhir-akhir ini mereka minta diantar jemput menggunakan mobil pribadi.

Singapura telah mengalami enam kali gelombang panas sepanjang sejarah, terakhir pada 2016. Gelombang panas adalah ketika suhu terpanas harian menembus 35 derajat Celsius selama tiga hari berturut-turut dan rata-rata suhu harian setidaknya 29 derajat Celsius.

Ilustrasi. Anak-anak sekolah di Singapura kesulitan belajar karena suhu panas ekstrem. (iStock/PraewBlackWhile)

Gangguan panas ekstrem terhadap kemampuan belajar bukan hanya dugaan para orang tua. Penelitian menunjukkan, cuaca panas ekstrem bisa memengaruhi kemampuan belajar anak-anak.

Dekan Departemen Ekonomi Universitas Nasional Singapura (NUS) Alberto Salvo meneliti dampak panas ekstrem terhadap performa akademis mahasiswa pada 2005-2019.

Penelitian itu menunjukkan ada penurunan performa akademis sekitar 1,5 persen pada saat suhu lebih panas dari biasanya.

Meski studi itu berfokus pada mahasiswa, Salvo berharap Pemerintah Singapura menjadikannya acuan untuk melihat dampak terhadap pelajar yang lebih muda. **(cnni/js)**

Kemenag Siapkan 3 Skema Lancarkan Armuzna .....

Dari Halaman 1

tinggi.

"Skema ini akan diterapkan secara selektif, khususnya bagi jemaah lansia, disabilitas, dan yang uzur. Tahun ini, diperkirakan sekitar 50 ribu jemaah akan mengikuti skema murur," kata Kamaruddin di Makkah, Minggu (1/6/2025).

Jemaah yang diikutkan dalam skema murur akan diberangkatkan dari Arafah dengan bus dan hanya melewati Muzdalifah. Jemaah yang ikut murur tidak turun di Muzdalifah dan langsung melanjutkan perjalanan ke Mina.

Berikutnya, ada skema tanazul yang baru diterapkan tahun ini. Kemenag menargetkan 30 ribu jemaah dari hotel-hotel di daerah Syisyah dan Raudhah akan mengikuti tanazul.

"Tanazul adalah pemulangan lebih awal ke hotel di Makkah setelah selesai lempar jumrah aqobah. Skema ini bertujuan untuk mengurai kepadatan Mina," ucapnya.

Jemaah yang mengikuti tanazul tak akan mabit di Mina setelah melempar jumrah tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Mereka langsung kembali ke hotel masing-masing.

Kamaruddin kemudian menjelaskan skema safari wukuf bagi jemaah sakit dan tak mungkin ikut wukuf di dalam tenda. Dia mengatakan jemaah tersebut akan mengikuti wukuf, yang merupakan rukun haji, dari dalam ambulans.

"Bagi jemaah yang dalam kondisi sakit dan tidak memungkinkan untuk wukuf secara reguler, kami telah siapkan layanan safari wukuf menggunakan ambulans. Sementara itu, jemaah yang wafat sebelum wukuf akan dibadal-hajikan oleh petugas resmi yang ditugaskan pemerintah. Hak mereka untuk berhaji tetap dijamin secara syariat," tuturnya.

Dia berharap, tiga skema tersebut dapat mempermudah pelaksanaan haji bagi jemaah Indonesia. Kamaruddin mengajak seluruh jemaah haji bersiap dan menjaga kesehatan menjelang wukuf.

"Kami mengajak seluruh jemaah untuk terus menjaga kekompakan, mengikuti arahan petugas, dan memperbanyak doa. Semoga semua dimudahkan dalam menunaikan ibadah haji secara sempurna, dan pulang ke Tanah Air sebagai haji yang mabrur," tuturnya**.(det/js)**

Kebebasan Pers: Retorika Istana atau .....

Dari Halaman 1

Jurnalis Independen (AJI) mencatat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang tahun, termasuk satu kasus pembunuhan. Bentuk kekerasan itu beragam: mulai dari intimidasi, teror, pelarangan liputan, hingga serangan digital dan peretasan. Mirisnya, aparat kepolisian disebut sebagai pelaku terbanyak.

Lebih jauh, jurnalis juga kerap menghadapi tekanan ekonomi dan politik yang memaksa mereka menerapkan swasensor—memilih diam atau menyensor diri sendiri demi menghindari risiko. Jika tekanan halus ini dibiarkan tanpa penanganan serius, maka Indonesia berisiko menghadapi kemunduran demokrasi secara perlahan. Pemerintahan baru harus menjawab tantangan ini dengan langkah nyata.

Setidaknya, ada tiga hal mendesak yang perlu dilakukan:

1. Menjamin transparansi kebijakan dan perlindungan hukum yang tegas bagi jurnalis,

2. Memperkuat lembaga pengawas media yang benar-benar independen dari kuasa politik atau modal,

3. Menjaga media dari intervensi ekonomi-politik agar tetap bisa menjalankan fungsi kontrol sosial.

Karena sejatinya, demokrasi tak cukup hanya dengan penyelenggaraan pemilu lima tahunan. Demokrasi hidup ketika warga negara bisa bersuara tanpa rasa takut. Untuk itu, kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik harus menjadi pondasi yang tak boleh dikompromikan**.(*)**

Mensos: Tujuan Sekolah ..

Dari Halaman 1

kapkan, salah satu tujuan program SR adalah memutus rantai kemiskinan. Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menghendaki kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan bisa berada di bawah lima persen pada 2029.

"Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyongsong 100 tahun (kemerdekaan) Indonesia di tahun 2045, itu adalah membuat Sekolah Rakyat. Sekolah ini menyisir anak-anak kita dari keluarga yang tidak mampu, yang miskin, miskin ekstrem, yang berpotensi putus sekolah, yang mungkin sekarang juga tidak melanjutkan sekolah," kata Gus Ipul ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Wonosobo, Ahad (1/6/2025).

Dia menyebut, selain Kementerian Sosial, beberapa kementerian lain turut terlibat dalam program SR. "Gubernur, bupati, wali kota, juga ada tugas khusus dari presiden," ujarnya.

Sementara itu Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, jajarannya siap membantu penyiapan SR di provinsinya. "Penyiapan sarana sekolah rakyat sebagaimana program pemerintah pusat (sudah dilakukan). Masing-masing kabupaten sudah mengajukan dan sudah dilakukan verifikasi," katanya saat mendampingi kunjungan kerja Gus Ipul ke Wonosobo.

Sebelumnya Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono telah menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menyeleksi guru-guru yang akan menjadi tenaga pengajar di SR. Dia mengatakan, salah satu syarat guru SR adalah harus memiliki empati terhadap para muridnya yang berasal dari keluarga miskin.

"Saat ini kita sedang asesmen, jadi Kemensos bersama Dikdasmen, juga bekerja sama dengan pemda. Karena guru-guru nanti, di mana sekolah (rakyat) itu kita bangun, gurunya juga harus berasal dari tempat itu. Misalnya Sekolah Rakyat di Kota Semarang, murid dan gurunya harus dari Kota Semarang," ucap Agus seusai mengisi seminar bertema "Deep Learning, Sekolah Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat" di Universitas PGRI Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/5/2025).

Wamensos menambahkan, pemerintah juga sedang menghitung berapa banyak kebutuhan guru SR untuk setiap kabupaten/kota. "Apakah (status gurunya) PPPK, apakah PPG, apakah ASN, itu sedang kita asesmen supaya nanti gurunya guru-guru yang terbaik," ujar Agus.

"Karena ini sekolah untuk rakyat miskin, tentunya guru-gurunya harus punya empati terhadap murid-muridnya yang berasal dari keluarga miskin," tambah Agus. .(rep/js)

Pancasila di Ruang Digital

Dari Halaman 1

dalam dari sekadar pengaruh asing. Pancasila sedang diuji bukan hanya oleh kekuatan luar, tetapi oleh internal masyarakat Indonesia sendiri—terutama dalam bentuk polarisasi sosial, manipulasi informasi, dan hilangnya ruang dialog sehat.

Pancasila dilahirkan untuk menyatukan bangsa. Namun kini, ia justru sering dijadikan alat untuk memecah. Alih-alih menjadi nilai bersama, Pancasila kerap dipakai untuk menyudutkan kelompok yang berbeda pandangan politik atau agama. Frasa "tidak Pancasilais" dilemparkan dengan mudah kepada siapa saja yang tidak sejalan, seolah hanya satu pihak yang berhak menjadi penjaga tunggal ideologi bangsa.

Dalam iklim politik yang cenderung polarisatif, Pancasila tak lagi menjadi jembatan nilai, melainkan senjata retoris. Di media sosial, misalnya, perdebatan tentang kebangsaan sering kali berujung pada pelabelan ideologis yang dangkal. Perbedaan pandangan dikerdilkan menjadi ancaman terhadap NKRI, tanpa ruang bagi argumen yang sehat dan inklusif.

Padahal, Bung Karno merumuskan Pancasila dengan semangat inklusi. Ia bukan hasil kompromi yang lemah, melainkan perjumpaan agung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Nusantara. Oleh karena itu, upaya menjadikan Pancasila sebagai milik satu kubu atau alat legitimasi kekuasaan justru mencederai esensi keindonesiaan itu sendiri.

Tantangan lain yang tak kalah serius adalah bagaimana Pancasila hadir di tengah kehidupan digital masyarakat. Ruang digital telah menjadi arena utama interaksi sosial, khususnya bagi generasi muda. Namun, ruang ini penuh dengan disinformasi, ujaran kebencian, dan kultur cancel yang menjauhkan masyarakat dari nilai kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah yang menjadi inti Pancasila.

Di platform-platform digital, algoritma lebih menyukai konflik ketimbang dialog. Konten provokatif lebih viral daripada konten reflektif. Dalam konteks ini, Pancasila tidak cukup hanya diajarkan sebagai teks normatif, tetapi perlu diaktualisasikan dalam literasi digital, etika komunikasi, dan keberanian untuk bersikap arif dalam menyikapi perbedaan.

Kita memerlukan upaya serius untuk mendidik generasi digital agar tidak terjebak dalam kebencian algoritmik. Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia, harus ditanamkan tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di ruang siber. Jika tidak, ruang digital justru akan melahirkan generasi yang mahir berselancar informasi tetapi miskin nilai dan empati.

Selama ini, Pancasila diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib. Namun dalam praktiknya, pendidikan Pancasila seringkali jatuh pada formalitas. Ia tidak hidup sebagai laku kehidupan, tetapi sekadar hafalan dan tugas kuliah. Siswa bisa menghafal lima sila, namun tidak tahu bagaimana bersikap ketika melihat ketidakadilan di sekitarnya.

Perlu ada perubahan paradigma dalam pendidikan Pancasila. Ia harus diposisikan sebagai ruang refleksi, bukan hanya pengetahuan. Pendidikan Pancasila harus melatih empati, membangun dialog, dan menumbuhkan keberanian moral untuk menghadapi kebatilan, sekaligus menjaga kemajemukan. Guru dan dosen harus diberi kebebasan dan metode kreatif untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik, bukan hanya teori.

Lebih dari itu, negara juga harus menjadi teladan. Tak mungkin mengharapkan siswa mencintai nilai kemanusiaan dan keadilan sosial jika mereka menyaksikan pejabat korup, hukum yang tajam ke bawah, dan birokrasi yang tidak melayani. Keteladanan jauh lebih efektif daripada doktrin.

Pancasila hanya bisa hidup jika ada ruang bersama yang dijaga. Artinya, kita perlu menciptakan kembali ruang-ruang dialog, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Media massa, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan komunitas keagamaan perlu menjadi ruang yang memupuk dialog kebangsaan, bukan memperuncing perbedaan.

Generasi muda perlu diberi kesempatan untuk menyuarakan keresahan mereka tanpa takut dicap. Berbeda pendapat bukan berarti anti-Pancasila. Justru keberanian untuk bersuara secara bertanggung jawab adalah bentuk kedewasaan demokrasi dan keberhasilan pendidikan ideologi bangsa.